

KONDISI POLITIK MANUSIAWI
(Kajian atas Filsafat Politik Hannah Arendt)
Oleh: Yahya Mof

Abstrak

Tulisan ini mengkaji filsafat politik Arendt, seorang filosof wanita asal Jerman, yang menekankan perlunya terbentuk sebuah kondisi politik yang manusiawi. Kondisi tersebut hanya dapat terwujud apabila kondisi primordial kemanusiaan yang plural ditampilkan sepenuhnya dalam wilayah publik. Artinya pluralitas itu tidak hanya disadari tapi juga harus mewujudkan dalam aktivitas setiap individu dalam wilayah publik. Untuk itu, Arendt membedakan aktivitas manusia menjadi tiga: kerja, karya, dan aksi. Dalam kerja dan karya fokus perhatian masih pada kepentingan individu. Oleh karenanya, kerja dan karya hanya pantas berada dalam wilayah privat. Sedang dalam wilayah publik aktivitas yang muncul dari setiap individu tidak lagi pada tahap kerja atau karya, tapi harus berada tahap aksi yang dibangun di atas kondisi plural manusia. Tanpa itu maka kondisi politik yang manusiawi tidak akan terwujud.

Kata kunci: *Kondisi, manusiawi, kerja, karya, aksi*

A. Pendahuluan

Apakah selamanya politik itu kejam
Apakah selamanya tiada sanggup menghantam
Ataukah itu yang memang sudah digariskan
Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya

Dunia politik dunia bintang
Dunia pesta pora para binatang
Berjoget dengan asyik¹

Dua penggal bait dari dua lagu Iwan Fals di atas seperti menggambarkan kepada kita bagaimana kotornya politik. Kita juga mengenal adagium yang sering muncul berkaitan dengan politik, “politik itu kotor”. Secara normatif mungkin tujuan politik itu baik, namun secara historis dan empiris politik seringkali hanya meninggalkan luka dan terutama oleh mereka yang tidak tahu-menahu. Wajar kemudian yang muncul adalah sikap pesimis terhadap politik dapat memperbaiki

¹Dua bait ini adalah sebagian dari lirik dua lagu Iwan Fals. Bait yang pertama penulis sudah lupa judul lagunya dan di album mana karena begitu banyaknya lagu Iwan Fals. Sedang bait kedua adalah sebagian dari lirik lagu Iwan Fals yang berjudul *asyik ngga' asyik* dalam album *Manusia Setengah Dewa*.

keadaan bangsa karena yang ada justru sebaliknya kehancuran, dan tingkah laku “binatang” dari para politisi. Kondisi politik yang selama ini kita lihat memang tidak menggambarkan sebuah kondisi yang manusiawi di mana setiap manusia dilihat sebagai person yang bebas dan mandiri. Masing-masing berebut tempat strategis untuk memperjuangkan kepentingan individu atau golongan bukan memperjuangkan kepentingan bangsa.

Mungkinkah kondisi politik yang manusiawi itu dapat terwujud? Secara normatif kita dapat menjawab “ya”. Bagaimana kondisi politik yang manusiawi itu? Di sini penulis akan mencoba menggambarkan kondisi politik yang manusiawi dan baik berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arendt dalam bukunya *The Human Condition*. Arendt adalah termasuk filsuf politik kontemporer yang langka karena menekankan aksi dalam posisi sentral hierarki aktivitas manusia dan mengaggapnya sebagai sarana untuk merealisasikan kapasitas kemanusiaan seperti halnya kebebasan dan individualitas. Kondisi politik yang manusiawi hanya mungkin terwujud ketika tindakan sebagai aktualisasi dari pluralitas dan kebebasan dapat teralisir. Selain itu, tindakan tersebut juga harus mampu terus hidup agar menjadi ingatan dan pelajaran bagi generasi mendatang.

Setelah menguraikan teori politi Arendt selanjutnya penulis akan memotret bagaimana kondisi politik di tanah air selama ini. Apakah adagium “politik itu kotor” masih relevan, atau semakin relevan atau kurang relevan. Untuk mengatakan tidak rasanya tidak mungkin karena memang politik adalah wilayah yang rentan dari berbagai kepentingan.

B. *Vita Activa*: Kerja, Karya dan Aksi

Dalam *The Human Condition* Arendt memberikan kerangka antropologis-fenomenologis yang menunjukkan aspek-aspek kondisi manusia yang berkaitan dengan *vita activa* (kehidupan aktif).² Dalam buku ini Arendt mengungkapkan tiga hal yang saling berkaitan: pelbagai kondisi, aktivitas dan wilayah *vita activa*. Pelbagai kondisi yang ia identifikasi adalah: bumi, kehidupan, keduniawian,

²Maurizio Passerin d' Entreves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, Terj. M. Shafwan. (Yogyakarta:Qalam, 2003), h. 58

pluralitas, kelahiran dan kematian. Aktivitasnya adalah kerja, karya dan aksi. Sedang wilayah *vita activa* adalah ruang publik dan ruang privat. Kehidupan merupakan kondisi yang terkait dengan kerja, keduniawian berkaitan dengan karya dan pluralitas berkaitan dengan aksi. Ketiga aktivitas ini, kerja, karya, aksi, pada gilirannya terkait dengan kondisi eksistensi manusia yang paling umum: kelahiran dan kematian.³

Ketiga aktivitas tersebut bersifat otonom, dalam arti memiliki prinsip sendiri dan wujud yang dapat dinilai dengan kriteria yang berbeda. Kerja dinilai dari kemampuannya menopang hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan reproduksi biologis. Sedangkan karya dinilai dari kemampuannya untuk membangun dan mempertahankan dunia sesuai dengan manfaat dan kesenangan manusia. Sedang aksi dinilai dari kemampuannya untuk memperlihatkan identitas pelaku untuk menegaskan realitas dunia, mengaktualisasikan kebebasan manusia, dan memberi makna eksistensi manusia.⁴ Arendt menganggap tiga aktivitas tersebut memiliki nilai penting bagi kesempurnaan hidup manusia, dalam pengertian bahwa masing-masing memberi kontribusi dalam merealisasikan kapasitas manusia dengan cara khasnya.

Pemikiran Arendt ini sangat dipengaruhi oleh konstelasi filsafat Yunani klasik yang membedakan antara *oikos* dan *polis*. *Oikos* adalah ruang privat, yakni ruang pemuasan kebutuhan-kebutuhan material. Sedang *polis* adalah ruang publik, yakni wilayah dimana setiap warga negara memiliki kebebasan dan dapat bertindak bersama. Pada saat itu setiap warga negara memiliki kehidupan yang mapan dalam rumah tangga, maka dalam ruang publik benar-benar berlaku kepentingan bersama bukan kepentingan individu. Apabila kita melihat dalam konteks sekarang, nampaknya hal ini sangat sulit diwujudkan karena wilayah negara yang begitu luas dan jumlah warga negara yang begitu banyak —karena setiap orang adalah warga negara yang membedakannya dengan masa Yunani klasik—sehingga sulit diharapkan partisipasi aktif setiap warga negara. Selain itu, persoalan juga muncul karena buramnya sekat antara ruang privat dan publik di era modern ini —yang ini

³Hannah Arendt, *The Human Condition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), h. 7-9

⁴*Ibid.*, h. 7-11

juga menjadi salah satu kritik Arendt. Karena konsepnya ini Arendt menuai kritikan dari Habermas, menurutnya Arendt hanya menelusuri kuasa politik secara eksklusif pada *praxis*, pembicaraan dan aksi bersama berbagai individu. Sehingga menjauhkan politik dari hubungannya dengan lingkungan ekonomi dan sosial yang mencakup dalam sistem administratif.⁵

Secara hirarkis Arendt meletakkan aksi sebagai aktivitas tertinggi dalam *vita activa* di atas dua aktivitas lainnya: kerja dan karya. Kerja merupakan tuntutan untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana binatang, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar biologisnya. Maka, manusia pada tingkat ini, disebut Arendt sebagai *animal laborans* (binatang yang bekerja). Manusia sebagai pekerja sama dengan budak, yang dicirikan dengan ketiadaan kebebasan. Pada tingkat ini kondisi manusia dibatasi oleh ritme perubahan musim, lingkungan bio-fisikal dan struktur biologisnya. Sedang melalui karya manusia dapat menguasai alam dan membebaskannya dari ketertundukan binatang dengan menghasilkan berbagai obyek yang berguna bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia di bumi. Pada tingkat ini manusia disebut dengan *homo faber* (manusia yang mencipta). Sebagai *homo faber* manusia menciptakan alat untuk mempermudah kerja dan melipatgandakan kemampuannya. Yang menjadi ukuran ideal *homo faber* adalah kegunaan sebuah alat bagi kenyamanan dan kelanggengan kehidupan manusia. Dua aktivitas ini, kerja dan karya, berada dalam ruang privat. Oleh karena itu, kurang berkaitan dengan pluralitas. Pada kerja, fokus perhatian pekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan privatnya. Sehingga kehadiran orang lain sebagai person yang mempunyai identitas kurang disadari dan dipertimbangkan. Sedang pada karya kehadiran orang lain pun belum mencirikan adanya pertimbangan pluralitas karena kehadiran orang lain hanya berfungsi instrumental, artinya orang lain sebagai tempat pengakuan prestasi dan nilai.

Berbeda dengan dua aktivitas sebelumnya, aksi hanya mungkin dilakukan di ruang publik. Ruang publik terdiri dari dua dimensi: *pertama*, ruang kebebasan politik dan kesamaan. Kedua hal ini tercipta apabila warga negara bertindak bersama-sama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi; *kedua*, dunia bersama,

⁵Maurizio Passerin d' Entreves, *Op Cit.*, h. 165-167

yakni semua bentuk institusi dan lingkup yang memberi konteks permanen bagi kegiatan warga negara.⁶ Aksi sangat berkaitan dengan pluralitas, karena tanpa kehadiran dan pengakuan yang lain aksi tidak lagi merupakan kegiatan yang bermakna. Karena itu aksi harus ditempatkan di ruang publik, dimana seseorang bisa dikenal dari kata-kata dan perbuatannya. Untuk memperoleh persetujuan orang lain, seseorang harus berada dalam konteks pluralitas.⁷

Menurut Arendt, aksi adalah representasi dari dunia politik dan sekaligus realisasi dari *vita activa* yang tertinggi. Ini dicirikan dengan terbangunnya sebuah hubungan yang langsung tanpa perantara dalam aksi, dan adanya pengakuan pluralitas sebagai sebuah kondisi yang mutlak di dalamnya sebagaimana diungkapkan secara tegas oleh Arendt dalam bukunya *The Human Condition*.

Aksi, merupakan satu-satunya aktivitas yang menghubungkan antara manusia secara langsung tanpa perantara benda atau barang, berhubungan dengan kondisi pluralitas manusia Pluralitas secara khusus tidak hanya sebuah kondisi yang dibutuhkan (*conditio sine quo non*) namun kondisi yang mutlak (*conditio per quam*) dalam seluruh kehidupan politik.⁸

Selain pluralitas, kondisi esensial aksi yang lain adalah kebebasan. Konsep kebebasan Arendt sangat terkait dengan kondisi kelahiran manusia. Kelahiran identik dengan memulai sesuatu yang baru. “Filsafat kebaruan”, keserbamungkinan, dan *new beginning* memang sangat mempengaruhi setiap tulisan Arendt.⁹ Pemikiran Arendt tentang hal ini sangat dipengaruhi oleh Augustine.¹⁰ Sehingga kebebasan yang dimaksud oleh Arendt adalah kapasitas untuk memulai, mengawali sesuatu yang baru, aksi yang tak terduga sebagai cerminan dari kelahiran manusia.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, ketiga aktivitas dalam *vita activa* — kerja, karya dan aksi— berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Kerja dan karya harus diciptakan dan dipertahankan di dunia tatkala manusia baru dilahirkan secara konstan. Namun dari ketiga aktivitas tersebut, hanya aksi yang paling dekat hubungannya dengan natalitas manusia, karena hanya dengan aksi individu

⁶Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 159

⁷Maurizio Passerin d' Entreves, *Op. Cit.*, h. 119

⁸Hannah Arendt, *Op. Cit.*, h.7

⁹Liam O' Sullivan, “The Moderns: Herbert Marcuse and Hannah Arendt—Critics of the Present” dalam *Political Thought from Plato to Nato*, (California: BBe Enterprises, 1984), h. 183

¹⁰Pengaruh Augustine terhadap Arendt dapat dilihat dari disertasinya. Lihat Hannah Arendt, *Love and Saint Augustine*, (Chicago: The University of Chocago Press, 1996)

akan mampu menghidupkan kembali keajaiban yang inheren dalam kelahiran mereka.¹¹ Arendt menyatakan: “permulaan baru yang inheren dalam kelahiran bisa membuat dirinya betah di dunia. Dan sebagai pendatang baru, ia memiliki kapasitas untuk memulai satu hal yang baru, yaitu bertindak.¹²

Arendt juga menegaskan fakta bahwa aksi sebagai permulaan itu berakar pada kelahiran, maka ia merupakan aktualisasi dari kebebasan yang berkapasitas untuk melakukan keajaiban, yaitu mengintroduksi apa yang tidak pernah diperkirakan. Arendt menegaskan:

Yang baru tidak diawali dari yang tidak terduga dari apapun yang mungkin terjadi sebelumnya. Karakter-karakter dugaan ini inheren dalam semua permulaan... fakta bahwa manusia mampu bertindak berarti segala yang tak terduga dan tak teramalkan bisa diharapkan darinya, bahwa ia bisa melakukan yang mustahil secara tak terbatas. Hal ini mungkin, karena setiap manusia adalah unik, bahwa setiap sesuatu yang lahir mendatangkan keunikan baru di dunia.¹³

Karena itu bertindak adalah berinisiatif, menggerakkan, memulai, dan melakukan hal yang tak dapat diduga. Contoh yang dikutip Hannah Arendt adalah Revolusi Amerika, Revolusi Perancis, Resistensi Perancis melawan Nazi Hitler. Di Indonesia aksi seperti ini terjadi pada revolusi 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. Dalam semua kasus tersebut, orang-orang berani menghentikan aktivitas rutin mereka dan melangkah maju dari kehidupan pribadi untuk menciptakan ruang publik di mana kebebasan bisa ditampakkan.

Dimensi aksi yang lain yang diungkapkan oleh Arendt adalah fungsinya untuk menyingkap identitas agen dalam pluralitas. Sebelum melangkah lebih jauh dalam persoalan ini, perlu diungkapkan tentang karakter ganda dari pluralitas. Pluralitas tidak hanya bercirikan persamaan hak dan kesetaraan manusia, namun juga menampilkan perbedaan setiap manusia, sehingga opini yang tampilpun berbeda-beda. Hanya manusia yang mampu mengekspresikan perbedaan serta hal yang membedakan dirinya. Arendt menegaskan:

Pluralitas manusia, merupakan kondisi dasar dari ucapan dan aksi, memiliki karakter ganda kesetaraan dan perbedaan. Jika manusia tidak setara, mereka tidak akan pernah mampu saling memahami sesama dan yang muncul sebelum mereka, atau merencanakan masa depan, serta meramalkan berbagai kebutuhan-kebutuhan pihak-

¹¹Maurizio Passerin d' Entreves, *Op. Cit.*, h. 114

¹²Hannah Arendt, *The Human Condition*, h. 9

¹³Hannah Arendt, *Ibid.*, h. 177-178

pihak yang kemudian akan muncul setelah mereka. Jika manusia tidak memiliki perbedaan, maka setiap manusia sulit dibedakan dengan manusia yang lain, baik dengan manusia yang ada maupun manusia yang akan ada, bahkan mereka tidak membutuhkan ucapan ataupun aksi untuk memahami diri mereka sendiri. Berbagai tanda dan bunyi yang digunakan secara langsung untuk berkomunikasi, membuat kebutuhan dan keinginan akan tercukupi.¹⁴

Sampai di sini memang terlihat ambivalensi Arendt dalam mengkonsepsi aksi atau tindakan. Apabila kita memakai tiopologi tindakan model Habermas yang membedakan empat tipe tindakan, yakni teleologis, normatif, dramaturgik, dan komunikatif, maka teori tindakan Arendt ambivalen antara tindakan dramaturgik dan komunikatif. Hal ini terjadi karena di satu sisi Arendt memahami aksi sebagai wujud penyingkapan identitas diri pelaku, dan di sisi lain Arendt mengartikulasikan konsepsi tentang aksi sebagai bentuk kebersamaan manusia dimana individu-individu bisa menetapkan hubungan timbal-balik dan solidaritas. Dalam konsepsi ini aksi dipahami sebagai tindakan komunikatif. Ambivalensi Arendt tentu tidak muncul karena memang adanya pertentangan antar dua tindakan tersebut secara obyektif, namun lebih dikarenakan ketidakmampuan Arendt mengintegrasikan kedua konsep tindakan tersebut secara apik dalam konsepsinya tentang aksi. Akibat ketidakmampuan ini muncul beberapa kritik terhadap pemikiran Arendt. Canovan, Parekh, dan Fuss menyatakan bahwa teori tindakan Arendt mengandung sebuah ketegangan diantara dua visi politik yang berbeda, visi elitis dan demokratis pada kasus Canovan, visi heroik dan partisapatoris dalam kasus Parekh, dan visi agonal dan akomodasional dalam kasus Fuss.¹⁵

Kembali ke konsep aksi Arendt, untuk memperlihatkan diri sebagai individu khusus dan memperlihatkan pada dunia bahwa personalitas mereka itu khas, maka menurut Arendt tidak cukup hanya mengandalkan aksi, diperlukan media lain untuk mengkomunikasikannya, yaitu bahasa/ucapan. Hanya dengan kedua hal ini — tindakan dan ucapan— manusia dapat menyingkapkan identitas mereka (siapa mereka), menunjukkan kekhasan mereka juga kemampuan dan bakat personal mereka (apa mereka).¹⁶

¹⁴Hannah Arendt, *Ibid.*, h. 175-176

¹⁵Maurizio Passerin d' Entreves, *Op. Cit.*, h. 159-165

¹⁶Hannah Arendt, *Op. Cit.*, h. 179

Aksi tanpa ucapan tidak akan pernah menjadi aksi, karena mengindikasikan ketiadaan aktor yang berbicara. Ketika tidak ada aktor maka tidak ada pelaku aksi. Melalui ucapan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku. Dengan ucapan manusia mengumumkan pada pihak lain apa yang ia perbuat, telah ia perbuat dan akan ia perbuat. Ketika manusia mengucapkan kata-kata, dibutuhkan tempat untuk mengkomunikasikannya dengan pihak lain. Tempat penampakan itu hanya mungkin terjadi dalam ruang publik. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang publik merupakan sarana untuk menemukan identitas pelaku aksi. Dengan demikian, penghancuran ruang publik menyebabkan manusia kehilangan kemampuan untuk bertindak dan berbicara.¹⁷ Begitu pun dengan kebebasan dan pluralitas yang inheren didalamnya turut dihancurkan.

Kapasitas untuk bertindak bersama untuk tujuan politik publik ini adalah apa yang disebut Arendt sebagai kekuasaan. Jadi kekuasaan (*power*) harus dibedakan dari kekuatan (*strength*), daya (*force*), dan kekerasan (*violence*). Berbeda dengan kekuatan, kekuasaan bukan milik seseorang, tetapi pluralitas pelaku yang bergabung untuk tujuan politik bersama. Berbeda dengan daya, kekuasaan bukan fenomena alam, tetapi ciptaan manusia, yaitu suatu prestasi bersama. Dan berbeda dengan kekerasan, kekuasaan tidak didasarkan pada paksaan tetapi pada persetujuan dan penilaian rasional. Karena itu, menurut Arendt, kekuasaan adalah produk aksi dan bersandar sepenuhnya pada persuasi.¹⁸ Ini membedakan konsep kekuasaan Arendt dengan konsep kekuasaan Weber, Machiavelli dan Hobbes yang memandang kekuasaan sebagai kekuatan untuk memaksakan kehendak. Pemerintah yang menggunakan paksaan dan kekerasan kepada warga negara untuk menuruti kehendaknya menurut konsep Arendt pada hakikatnya tidak berkuasa. Karena kekuasaan hanya mungkin dilaksanakan melalui persuasi yang ditandai dengan aksi bersama, bukan paksaan satu pihak kepada pihak lain. Pada masa revolusi 1998, kekuasaan ada pada aksi bersama warga negara untuk mewujudkan sebuah ruang publik yang terbuka terhadap pluralitas, bukan pada pemerintah Orde Baru. Orde Baru sudah kehilangan kuasanya sebelum ia diruntuhkan.

¹⁷Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, (Yogyakarta: Galang, 2004), h. 166

¹⁸Maurizio Passerin d' Entreves, *Op. Cit.*, h. 131

C. Mentalitas Kerja dan Karya Para Birokrat

Meskipun konsep politik Arendt di atas banyak menuai kritikan karena memang keterbatasan cakrawala setiap pemikir, namun tidak menjadikan konsepnya tidak berguna untuk konteks sekarang. Menurut penulis ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari konsep Arendt terutama berkaitan dengan konsep *vita activa* yang membagi aktivitas menjadi tiga: kerja, karya, dan aksi. Konsep ini dapat membantu kita menganalisa bagaimana perilaku politik institusi-institusi yang mendapat kuasa dari rakyat, dalam hal ini terutama perilaku pemerintah dan DPR. Apakah mereka sudah pada tingkat aksi ataukah masih berada pada tingkat karya bahkan mungkin masih tingkatan kerja.

Akhir-akhir ini kita mendengar berita banyak sekali tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, pusat dan daerah. Banyak anggota DPR, Gubernur dan walikota/Bupati sudah ditahan dengan sangkaan korupsi, dan bahkan ratusan anggota DPRD tingkat I dan II. Ini menunjukkan bahwa aktivitas sebagian institusi yang memegang kuasa rakyat masih berada pada tingkat kerja, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan tubuh sang pelaku tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negara yang lain. Pada tingkat ini kita dapat memahami bahwa institusi yang memegang kuasa dari rakyat selama ini hanya menjadi birokrat dan masih sebagai *animal laborans* (binatang pekerja). Ruang publik hanya dipahami sebagai tempat mata pencaharian semata. Sehingga yang diusahakan adalah bagaimana dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari perkerjaan sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, atau anggota DPR baik pusat, daerah tingkat I, maupun tingkat II. Maka wajar saja apabila KKN begitu meraja lela dan mewarnai segala tindakan pemerintah dan DPR. Ironisnya mentalitas kerja ini juga sudah sampai pada tingkat skop pemerintahan yang paling kecil, Desa/Kelurahan. Saya menduga ini terjadi bukan hanya karena orang atau manusianya saja tapi juga karena sistem dan budaya yang berjalan. Budaya KKN adalah seperti virus yang dapat menginfeksi siapa saja. Ketika KKN dilakukan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan terlihat 'aman-aman' saja, maka pada tingkat lebih bawahpun akan terjangkit hal ini karena merasa akan 'aman-aman juga'. Selain itu, sistem yang ada juga masih membuka peluang untuk terjadinya KKN. Seperti proyek-proyek pemerintah, baik bangunan

maupun pengadaan masih terlihat sistem tender yang rentan dengan KKN karena kurangnya transparansi.

Selama mentalitas Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Anggota DPR, DPRD I, DPRD II, Menteri bahkan Presiden masih pada tingkat kerja sebagai birokrat maka mustahil sebuah kehidupan yang manusiawi di mana hak-hak setiap warga negara dipandang secara sama dan memiliki kebebasan yang sama dapat terwujud. Ketika KKN sudah dilakukan oleh oknum yang memegang kuasa rakyat, dan dilakukan secara struktural dan masif, maka ruang publik pun tidak lagi menjadi tempat bersama warga negara dimana mereka memiliki kebebasan untuk bertindak bersama. Karena mereka akan cenderung menutup-nutupi perbuatan tersebut dengan berbagai cara. Yang ada kemudian bukanlah persuasi dan wicara yang menghormati pluralitas dan kebebasan, namun yang ada adalah propaganda dan teror. Maka munculah pembredelan terhadap berbagai media, kekerasan dengan penculikan, bahkan pembunuhan secara misterius (dalam kasus HAM, contohnya adalah kasus Munir). Baru-baru ini kita mendengar banyak tindakan teror yang dilakukan oleh para “koruptor tersembunyi” dan mungkin koruptor yang sudah terungkap. Salah satunya yang kriminalisasi KPK seperti pada kasus Antasari Azhar yang disinyalir banyak rekayasa. Teror tersebut bisa berbentuk kekerasan fisik maupun secara simbolik yang menggunakan kekuatan hukum untuk menakuti-nakuti (biasanya digunakan oleh para pengacara).

Masih banyak lagi kasus dan persoalan berkenaan dengan para birokrat yang menggambarkan bagaimana aktivitas mereka belum pada tingkat aksi, namun masih pada tingkat karya bahkan kerja. Rasanya semua kasus tersebut tidak akan dapat diangkat semuanya dalam tulisan ini. Namun apa yang ingin penulis ungkapkan di sini adalah mendeskripsikan sebuah kenyataan empiris yang kita lihat dan dengar.

Mungkin semua ini tidak akan terjadi apabila mentalitas para birokrat yang masih pada tingkatan kerja dan karya berubah menjadi mentalitas aksi yang menghormati pluralitas bukan sebagai sesuatu yang dibutuhkan namun sesuatu yang mutlak. Dan kebebasan, dalam artian kemampuan untuk berinisiatif masyarakat tidak dipasung dengan tindakan-tindakan represif. Sehingga setiap masyarakat tidak dipahami sebagai obyek, ataupun refleksi pemerintah namun sebagai person yang

mandiri yang bebas berinisiatif. Hanya dengan begitulah sebuah kondisi politik yang manusiawi dapat terwujud.

Gadamer menunjukkan ada tiga pola dialog antara penafsir (Aku) dan teks (Kamu)¹⁹ yang dapat kita analogikan dalam hubungan Pemerintah dan masyarakat. *Pertama*, Kamu sebagai obyek dari Aku. Artinya masyarakat dalam hal ini dipandang sebagai obyek yang dapat ditunjuk dan diramalkan secara pasti. Dalam dialog ini masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar diri Pemerintah dan tidak mempunyai pengaruh terhadap Pemerintah. Pola dialog model ini akan mengantarkan pada pengobyektivan masyarakat. *Kedua*, Kamu sebagai refleksi dari Aku. Dalam hubungan ini masyarakat dipandang dan diakui sebagai person, tetapi masih sebagai refleksi atau “cerminan” yang dicerminkan Pemerintah. Sehingga masyarakat masih tetap dipahami dari sudut pandang Pemerintah. Dalam pola ini masyarakat belum dipahami sebagai sesuatu yang unik.. Masyarakat tidak dibiarkan berbicara sendiri. Sehingga dominasi Pemerintah terhadap masyarakat mendasari pola dialog ini dan bukannya “keterbukaan”. *Ketiga*, Kamu sebagai Kamu. Dalam pola ini terwujud keterbukaan sehingga masyarakat dapat dipahami seutuhnya sebagai person yang mandiri dan unik. Dalam keadaan ini bukan hanya Pemerintah yang terbuka kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat pun terbuka terhadap Pemerintah. Dengan begitu hubungan dan dialog yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat adalah dialog yang bercirikan keterbukaan yang berarti saling memberi dan menerima. Sehingga memungkinkan masing-masing pihak saling mempengaruhi.

D. Penutup

Apabila kita melihat realita politik yang sekarang ini nampaknya ungkapan bahwa politik itu kotor memang masih mendapatkan justifikasinya dari realitas empiris yang ada. Maraknya KKN, penggusuran, kasus Bojong adalah beberapa contoh dari bagaimana “kekuasaan politik” begitu kejam dan menegaskan kondisi manusiawi yang bercirikan kebebasan dan pluralitas. Sehingga kekuasaan masih

¹⁹Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 226-228

dijalankan dengan kekerasan bukan wicara dan persuasi yang mencirikan tindakan komunikatif.

Dengan konsep *vita activa* Arendt yang membagi aktivitas menjadi tiga: kerja, karya dan aksi dapat dikatakan bahwa aktivitas institusi yang berwenang menjalankan kekuasaan rakyat masih berada pada tingkat kerja dan karya. Hubungan yang terbangun antara unstitusi tersebut dengan rakyat bukanlah model hubungan dan dialog keterbukaan namun masih menganggap masyarakat sebagai obyek dan sebagai pantulan dari kesadaran mereka bukan sebagai person mandiri yang bebas dan unik. Sehingga bentuk pemerintah yang terbangun belum dalam bentuk demokrasi partisapatoris yang mengandaikan partisipasi setiap warga negara dalam setiap kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. *The Human Condition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1998)
- _____, *Love and Saint Augustine*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1996)
- d' Entreves, Maurizio Passerin, *Filsafat Politik Hannah Arendt*. Terj. M. Shafwan. (Yogyakarta: Qalam, 2003)
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- O' Sullivan, Liam. "The Moderns: Herbert Marcuse and Hannah Arendt—Critics of the Present" dalam *Political Thought from Plato to Nato*. (California: BBC Enterprises, 1984)
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Pitaloka, Rieke Diah, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, (Yogyakarta: Galang, 2004)